

RUANG PUBLIK PENDIDIKAN SEBAGAI RELASI ETNIK DAN AGAMA

Adam Latuconsina, Muhammad Iqbal

Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon, Pascasarjana IAIN Ambon

adam_ltc@yahoo.com; muhammadiqbaltuny@gmail.com

Abstrac: When Arab traders traveled to the archipelago, followed by the Portuguese and Dutch in the 16th century and the presence of Arab traders brought religion. Islam. Conflicts in various places including in Maluku, which have an impact on the pattern of inter-religious and ethnic relations. This phenomenon has an impact on relations in the public sphere, especially in universities, so that a good education pattern is needed for the formation of community character. This research is a qualitative descriptive study. The purpose of this research is to analyze the role of public education spaces in establishing ethnic and religious relations. The type of research is field research where data collection is done through observation, interviews, and documentation techniques, then analyzed through the stages of data reduction, data display, data interpretation and conclusion drawing. Research result; 1. Educational institutions are effective public spaces for the creation of ethnic and religious relations. This is possible because there are at least three main elements that are always involved in interactions or reciprocal relationships in the education public sphere, namely educators, students and parents. Through the interaction and assimilation of various elements in the education public sphere, everyone knows each other and learns from the diversity they have, individuals are expected to be able to transform themselves to find self-perception in encounters with other groups outside themselves, so as to form better inter-religious and ethnic relations. 2. Strategic educational institutions are used as media to form the character of the community (students) because the essence of education is to humanize humans.

Key words: education, public space, ethnic relations

Abstrak: Ketika para pedagang bangsa Arab melakukan perjalanan ke wilayah nusantara, diikuti oleh bangsa Portugis dan Belanda abad ke-16. Maluku pada saat itu menjadi sasaran utama kehadiran para pedagang, baik dari wilayah Asia maupun Eropa. Kehadiran pedagang bangsa Arab membawa agama Islam. Dalam dua dekade terakhir terjadi konflik di berbagai tempat termasuk di Maluku, yang berdampak pada pola hubungan antar agama dan etnik. Fenomena tersebut berdampak terhadap relasi di ruang publik khususnya di perguruan tinggi, sehingga diperlukan pola pendidikan yang baik bagi pembentukan karakter masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran ruang publik pendidikan dalam menjalin relasi etnik dan agama. Tipe penelitian adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian; 1. Lembaga pendidikan merupakan ruang publik yang efektif bagi terciptanya relasi etnik dan agama. Hal ini dimungkinkan karena sedikitnya terdapat tiga unsur utama yang selalu terlibat dalam interaksi atau hubungan timbal-balik di ruang publik pendidikan, yakni pendidik, peserta didik dan orang tua. Melalui interaksi dan pembauran berbagai unsur di ruang publik pendidikan, setiap orang saling mengenal dan belajar dari keragaman yang dimiliki, individu diharapkan dapat mentransformasi diri menemukan persepsi diri dalam perjumpaan dengan kelompok lain di luar dirinya, sehingga dapat membentuk relasi antar agama dan etnik secara lebih baik. 2. Lembaga pendidikan strategis dijadikan media pembentuk karakter masyarakat (peserta didik) dikarenakan hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia.

Kata kunci: pendidikan, publik, relasi etnik, agama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak etnik atau suku bangsa, bahasa serta keyakinan agama. Keragaman yang dimiliki tersebut pada satu sisi merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain, memiliki potensi terjadinya konflik yang mengakibatkan disintegrasi atau perpecahاندalam masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia yang multikultur secara sosiologis membentuk kelompok-kelompok yang kemudian mengidentifikasi diri dalam masing-masing identitas kultural.¹ Proses pembentukan identitas terjadi dalam perjumpaan dengan etnis lain dalam lingkup pergaulan yang intens serta melakukan hubungan lintas budaya dan mengintegrasikan identitas kultural masing-masing.² Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, dibutuhkan keharmonisan hubungan antar agama dan etnik, dengan tetap menghargai keberadaan kelompok etnik dan agama masing-masing.³ Namun demikian, dalam dua dekade terakhir terjadi konflik di berbagai tempat termasuk di Maluku, yang berdampak pada pola hubungan antar agama dan etnik. Fenomena tersebut berdampak pula terhadap relasi di ruang publik khususnya di perguruan tinggi, sehingga diperlukan pola pendidikan yang baik bagi pembentukan karakter masyarakat. Dalam konteks Maluku, relasi antar etnik dan agama yang baik penting bagi masyarakat Maluku pascakonflik yang sedang giat membangun, agar dapat memajukan diri setara dengan daerah-daerah lainnya.

Apabila ditelusuri ke belakang, ditemui bahwa hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat yang beda etnik dan agama di Maluku mulai terjadi sejak abad ke-9 Masehi, ketika para pedagang bangsa Arab melakukan perjalanan ke wilayah

¹Identitas kultural di sini dipahami sebagai ciri khas dari individu dan kelompok tertentu yang menandai keberadaan orang tersebut dengan kebudayaan yang dimilikinya, baik asal-usulnya maupun cara berelasi dengan orang atau kelompok lain. Lihat Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 68-72.

²Tentang perjumpaan etnik, lihat Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2009).

³Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanjoto; Niko L. Kana (editor), *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), h. 77.

nusantara, diikuti oleh bangsa Portugis dan Belanda abad ke-16. Maluku pada saat itu menjadi sasaran utama kehadiran para pedagang, baik dari wilayah Asia maupun Eropa karena keberadaan rempah-rempah yang dimilikinya terutama pala dan cengkih.⁴ Kehadiran pedagang bangsa Arab membawa serta ajaran agama Islam,⁵ sedangkan kehadiran bangsa Portugis membawa serta agama Kristen Katolik⁶ dan bangsa Belanda membawa serta agama Kristen Protestan⁷ ke Maluku.

Lembaga pendidikan secara umum, khususnya perguruan tinggi sebagai ruang publik menurut hemat penulis strategis dijadikan sebagai media bagi terciptanya relasi etnik dan agama dalam rangka pembentukan karakter karena perguruan tinggi berfungsi sebagai pembentuk intelektual di satu sisi dan pembentuk moral spiritual pada sisi lainnya. Hal ini yang akan dibicarakan dalam jurnal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian

⁴Suaidi Marasabessy (ed), *Maluku Baru; Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik*, (Jakarta, PT Abadi, 2002), h. 8.

⁵Agama Islam telah melembaga sekitar tahun 1480 di Maluku Utara dan berkembang terus ke Maluku Tengah dan Maluku Selatan. Proses pengislaman itu berlangsung sampai pertengahan abad ke 17. H.J. de Graaf, *De Geschiedenis Van Ambon En De Zuid Molukke*, di alih bahasa oleh Frans Rijoly, *Sejarah Ambon dan Maluku Selatan*, (Groningan, tp. 1977), h. 31-38. Lihat juga, R.Z. Leirisa, *Bungan Rampai Sejarah Maluku* (1) (Jakarta; Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional-LIPI, 1973, Lihat juga, M. Adnan Amal, *Maluku Utara; Perjalanan Sejarah 1250-1800*, Jilid I, Cet. I., (Ternate, Universitas Khairun, 2002).

⁶Pada permulaan abad ke-16 muncul Portugis di Maluku. Kekuasaan tersebut telah berlangsung hampir satu abad (1512-1602) dan menampakkan pengaruhnya terutama dalam bidang perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen (misi Katolik) kepada penduduk asli. Kedudukan mereka mula-mula di Maluku Utara (Ternate) kemudian pindah ke Ambon (1575).. F.L Coolye, dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku*, 1973, h. 122, Lihat juga, M. Adnan Amal, *Maluku Utara; Perjalanan Sejarah 1250-1800*, Jilid I., Ternate, Universitas Khairun, 2002

⁷Pada abad 17 masuk kekuasaan Belanda (VOC) dan menggantikan kebudayaan Portugis. Agama Kristen Katolik beralih ke agama Kristen Protestan. Bagi orang-orang Belanda (VOC) bukan bidang keagamaan yang dipentingkan melainkan bidang perdagangan, sejak tahun 1605 sampai 1675 VOC berhasil mencapai dan mempertahankan suatu tujuan politik ekonomi yang juga dikejar Portugis, yaitu menguasai secara mutlak perdagangan rempah- rempah. Leirisa, *Ibid*, h. 5.

adalah menganalisis peran ruang publik pendidikan dalam menjalin relasi etnik dan agama. Tipe penelitian adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Etnik

Sebelum melihat seperti apa relasi etnik dan agama terjadi di ruang publik pendidikan, berikut ini dikemukakan konsep tentang etnik dan agama. Etnik berhubungan dengan suku bangsa yakni, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan suku bangsa lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.⁸ Bila ditelusuri asal usulnya, kata etnik (Indonesia) atau *ethnic* (Inggris) berasal dari bahasa Yunani *ethnos* yang mengandung pengertian bangsa atau orang. *Ethnos* kemudian dimaknai secara luas dalam pengertian setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya. Pengertian ini sekaligus menandakan suatu kelompok sebagai yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat.

Terdapat keragaman pemikiran tentang konsep etnik. Secara umum etnik dipahami sebagai himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi yang terikat pada sistem nilai budayanya.⁹ Sejalan dengan Barth, Martin Blumer, memahami etnik atau yang biasa disebut dengan kelompok etnik adalah satu kelompok kolektif manusia dalam penduduk yang luas, yang memiliki kenyataan atau cerita asal-usul yang sama, mempunyai kenangan terhadap masa lalu, yang terfokus pada satu unsur simbolik atau lebih yang mendefinisikan identitas

⁸Koentjaraningrat,dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984).

⁹Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya*, Jakarta: UI-Press, 1988.

kelompok, seperti kekerabatan, agama, bahasa, pembagian wilayah, tampilan nasionalitas dan fisik (suku bangsa dan fisik), yang anggotanya sadar bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok tersebut. Diana (2003) dalam Liliweri, melihat etnik sebagai kumpulan orang yang dapat dibedakan terutama oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa, yang meliputi: pertama, keunikan dalam perangai (*trait*) budaya; kedua, perasaan sebagai satu komunitas; ketiga, memiliki perasaan etnosentrisme; keempat, mempunyai status keanggotaan yang bersifat keturunan dan kelima, berdiam atau memiliki teritori tertentu.¹⁰

Narroll sebagaimana dikutip oleh Fredrik Barth¹¹ menyebutkan bahwa umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang:

- a) Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.
- b) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya.
- c) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri.
- d) Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Fredrik Barth melihat kelompok- kelompok etnik dalam dua perspektif. *Pertama*, sebagai unit-unit kebudayaan dan kedua sebagai suatu tatanan sosial. Mengenai kehadiran kelompok-kelompok etnik sebagai unit-unit kebudayaan, Barth berpendapat bahwa pertama, dengan adanya aspek budaya ini, klasifikasi seseorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut. *Kedua*, bentuk-bentuk budaya yang tampak menunjukkan adanya pengaruh ekologi atau bentuk budaya ini merupakan hasil penyesuaian para anggota kelompok etnik dalam menghadapi berbagai faktor luar. Kelompok etnis sebagai suatu tatanan sosial menegaskan bahwa ia menentukan ciri khasnya sendiri yang

¹⁰Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : *Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS, 2005, h. 9.

¹¹Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h.11.

dapat dilihat oleh kelompok lain. Kelompok-kelompok etnik sebagai suatu tatanan sosial terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengkategorikan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi.¹²

Dalam pengertian yang terbatas, kelompok etnik dimengerti sebagai suatu kelompok baik kelompok ras¹³ maupun bukan kelompok ras yang secara sosial berbeda dan telah membentuk subkultur tersendiri. Ikatan positif yang menjalin hubungan antara beberapa kelompok etnik dalam suatu sistem sosial yang luas sangat tergantung pada sifat budayanya yang saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi inilah yang menimbulkan suatu ketergantungan atau kondisi simbiosis. Sehubungan dengan ini, Barth mengemukakan bahwa mekanisme dalam mempertahankan batas etnik sangat efisien karena *pertama*, kompleksitas timbul berdasarkan adanya perbedaan budaya yang penting dan saling melengkapi. *Kedua*, perbedaan ini harus dibakukan secara umum dalam kelompok etnik yang bersangkutan, yaitu kelompok status, atau status sosial setiap anggota kelompok umumnya sama, sehingga interaksi antar etnik berlangsung atas dasar identitas masing-masing etnik. *Ketiga*, ciri budaya setiap kelompok harus benar-benar stabil, sehingga perbedaan yang saling melengkapi yang menjadi dasar sistem itu dapat bertahan selama berlangsungnya kontak antaretnik.¹⁴

Konsep Agama

Pertanyaan tentang apa itu agama mendapat perhatian banyak kalangan dan telah dibahas oleh para ahli dari berbagai disiplin. Penulis tidak membahas satu demi

¹²Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 13-14.

¹³Kata ras berasal dari bahasa Arab yang artinya keturunan. Dalam studi Antropologi, ada tiga pandangan yang saling melengkapi mengenai apa yang dimaksud dengan ras. Pertama, ras adalah segolongan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan, sehingga berdasarkan itu dapat dibedakan dari kesatuan yang lain. Kedua, ras adalah segolongan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri jasmani karena diturunkan, jadi ciri-ciri kerohanian tidak diperlukan di sini, dan yang ketiga, ras didefinisikan sebagai *A group which shares in common a certain set of innate physical characters and a geographical origin within a certain area* (N. Daldjoeni, 1991: 1).

¹⁴Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya*, (Jakarta: UI-Press, 1988). h. 20.

satu pemikiran atau definisi tentang agama yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi penulis mengemukakan pandangan ahli tertentu yang dianggap lebih tepat dan cocok dengan penulisan ini. Atau dengan lain perkataan, penulis tidak bermaksud melakukan pembahasan mengenai agama seperti yang telah dilakukan oleh para antropolog, sosiolog, psikolog dan teolog. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan pemikiran salah satu ahli yang dianggap lebih tepat selaku menjadi acuan dalam rangka mengembangkan pemikiran sesuai dengan isu penulisan ini.

Menurut hemat penulis, Emile Durkheim (sosiolog) memiliki pandangan yang tepat dalam hubungan dengan penulisan ini karena ia mengembangkan definisi fungsional agama (*the functional definition of religion*). Agama didefinisikan dalam pengertian perannya dalam masyarakat. Dalam hal ini agama menyumbangkan kepada masyarakat, apa yang disebut Durkheim sebagai *the matrix of meaning*. Dengan demikian, agama merupakan suatu sistem interpretasi terhadap dunia yang mengartikulasikan diri, tempat dan tugas suatu kelompok masyarakat dalam alam semesta. Di sini agama menentukan perspektif di mana individu maupun suatu komunitas atau para penganut agama tertentu memandang dan mengerti diri mereka serta relasi-relasi mereka dengan komunitas yang lebih luas serta alam atau lingkungannya.

Emile Durkheim melihat agama secara sosial dan mencari asal usul agama dalam tingkat kehidupan sosial atau bukan pada tingkat pribadi. Durkheim memberikan penekanan bahwa agama di satu pihak merupakan satu sistem yang utuh dari kepercayaan dan praktek- praktek yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral tetapi dipihak lain merupakan praktek-praktek yang menyatukan mereka ke dalam suatu komunitas moral.¹⁵ Menurut Durkheim, agama merupakan sesuatu yang sesungguhnya berwatak sosial. Gambaran keagamaan adalah gambaran kolektif yang mengekspresikan kenyataan kolektif yang merupakan hasil kerja sama yang tersebar

¹⁵E. Durkheim, *The Elementary Form of The Religion Life* (New York : The Free Press 1965) h. 62-63 . Komunitas moral yang dimaksud oleh Durkheim adalah lembaga formal agama.

pada suatu waktu dan tempat tertentu. Karenanya bagi Durkheim, sikap keagamaan lahir dari tengah situasi mental yang luar biasa dari lingkungan sosial masyarakat. Selain itu menurutnya, religi adalah kesatuan sistim kepercayaan dan tindakan yang berhubungan dengan barang-barang suci. Barang-barang suci yang dimaksudkan, adalah barang atau benda yang diasingkan dan diberikan larangan atasnya. Dalam perspektif ini, penulis melihat bahwa barang-barang suci kelompok-kelompok agama cenderung dijadikan simbol penanda identitas dalam suatu komunitas. Durkheim, sebagaimana dikutip oleh Harsojo mengatakan bahwa fungsi sosial yang esensial dari religi ialah hal menciptakan, memaksakan dan mempertahankan solidaritas kelompok.¹⁶

Dimensi fungsional dari agama dengan sendirinya menempatkan agama dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah. Penulis melihat bahwa pemikiran Durkheim tentang agama seperti dikemukakan di atas lebih dinamis untuk digunakan dalam rangka memahami hubungan antar kelompok-kelompok beda etnik dan agama di Maluku pasca konflik

Relasi Etnik dan Agama di Ruang Publik

Disadari atau tidak, pada lingkungan pendidikan seorang peserta didik mengalami rasionalisasi pandangan dan pendapat terhadap nilai-nilai baru yang didapatnya. Layaknya sebuah komunitas, lembaga pendidikan juga mempunyai pola interaksi dan berbagai pertemuan antara berbagai kelompok, perbedaan agama beserta berbagai ketegangan dan konflik yang terjadi di dalamnya. Lingkungan pendidikan cenderung menjadi tempat yang rentan terhadap pengaruh ketegangan dan konflik yang terjadi di masyarakat luar. Sebagai misal, terjadinya pemisahan institusi di Ambon, diakibatkan oleh telah terjadinya konflik keagamaan yang panjang selama lebih kurang empat tahun (1999-2003). Polarisasi model baru pasca konflik yang terjadi di kota Ambon antara pemukiman Islam dan pemukiman Kristen

¹⁶Emile Durkheim dalam Harsojo, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), h. 224.

mengakibatkan munculnya polarisasi antara institusi pendidikan Kristen dan institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Kristen otomatis bertempat di wilayah mayoritas Kristen, sedangkan institusi pendidikan Islam bertempat di wilayah dengan mayoritas penduduknya Islam. Kategori ini untuk melihat lembaga pendidikan umum atau publik yang mayoritas peserta didiknya adalah beragama Kristen atau Islam dan bertempat pada suatu wilayah mayoritas agama tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasca runtuhnya rezim Orde Baru, masyarakat Indonesia semakin menempatkan identitas agama dan kesukuan sebagai identitas utama baru yang kemudian melebihi identitas kebangsaan dan kemanusiaannya.¹⁷ Munculnya rasa kebangkitan akan etnisitas dan agama ini tentunya juga menular hingga ke wilayah-wilayah pendidikan sebagai sebuah “komunitas” yang tidak terlepas dengan wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada beberapa lembaga pendidikan di Kota Ambon, ditemui bahwa:

Pertama pada lembaga pendidikan yang berada di lingkungan mayoritas Kristen, terdapat relasi yang lebih intens pada etnis atau komunitas sendiri dibanding dengan etnik lain. Walau begitu, hubungan dengan etnis pendatang lain dan agama lain tetap dilakukan. Penulis melihat bahwa kecenderungan ini terjadi karena faktor lingkungan pendidikan dan wilayah domisili yang mayoritas seagama. Dalam hal ini ikatan emosional seagama cukup mendominasi pemikiran dan sikap peserta didik dalam membangun relasi antar sesama.

Kedua, pada lembaga pendidikan yang mayoritas muslim, peserta didik lebih senang berinteraksi dengan sesama etnik sendiri dibanding dengan interaksi dengan sesama etnik lain. Hal ini karena para peserta didik memiliki hubungan emosional etnik atau kedaerahan yang lebih besar dibandingkan dengan hubungan seagama. Hal

¹⁷Periksa pula misalnya pada laporan seperti diperlihatkan penelitian *Center for Democracy and Human Rights Studies* (Demos) tahun 2005 yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menempatkan identitas agama dan kesukuan sebagai identitas utama, baru kemudian identitas kebangsaan dan kemanusiaannya.

ini menunjukkan bahwa sikap panatisme daerah atau negeri asal lebih kuat pada diri peserta didik, dan berimplikasi pada pergaulan mereka dengan sesama rekan yang berasal dari daerah lain. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan kenyataan bahwa pada beberapa tahun terakhir masih terjadi konflik antar kampung atau negeri di kalangan komunitas muslim. Konflik tersebut turut memengaruhi sikap interaksi siswa yang berasal dari negeri tertentu yang berkonflik.

Ketiga, pada lembaga pendidikan yang peserta didiknya berimbang antara Kristen dan muslim, peserta didik cukup toleran dalam hal membangun relasi antar etnik dan agama, sementara relasi antara sesama rekan seagama tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Peserta didik yang berimbang antara komunitas Kristen dan muslim menunjukkan sikap saling menghargai dan memberikan sapaan satu terhadap yang lain, tanpa membedakan etnik dan agama.

Pengaruh Relasi Etnik dan Agama

Penelitian di Ambon menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi relasi etnik dan agama di ruang publik pendidikan adalah sebagai berikut: (1) wilayah domisili, (2) lingkungan pendidikan, (3) kegiatan kependidikan dan proses pembelajaran (4) aktivitas sosial keagamaan. *Pertama*, wilayah domisili menjadi salah satu faktor yang memengaruhi relasi peserta didik adalah karena sebelumnya telah terjadi interaksi sebelum mereka mengalami perjumpaan dengan sesama peserta didik lain di lingkungan pendidikan, sehingga telah terbangun sikap penerimaan satu terhadap yang lainnya. *Kedua*, lingkungan pendidikan merupakan faktor yang turut memengaruhi relasi peserta didik karena antara pihak pengelola pendidikan dan masyarakat sekitar terdapat rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada lembaga pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pengawasan terhadap lingkungan pendidikan dan mendukung program lembaga pendidikan. Sementara itu, kalangan

internal pengelola pendidikan tetap menjalin relasi baik dengan masyarakat sekitar dalam implementasi program-program pendidikan.

Ketiga, kegiatan kependidikan dan proses pembelajaran menjadi faktor penting yang memengaruhi relasi peserta didik (1) karena dari aspek kurikulum memungkinkan peserta didik saling berinteraksi. (2) karena dari pengelolaan kelas tempat duduk peserta didik telah diatur sedemikian rupa agar mereka dapat berkomunikasi lintas agama dan etnik. Hal ini membantu mencairkan kebekuan relasi yang sebelumnya belum terbangun secara baik di kalangan peserta didik. (3) aktivitas sosial keagamaan, disadari atau tidak menjadi faktor penting dalam membangun relasi antar peserta didik yang seagama dan seetnik maupun yang beda agama dan beda etnik. Aktivitas sosial keagamaan peserta didik di sini meliputi aktivitas keagamaan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat serta kegiatan-kegiatan monumental seperti keterlibatan dalam panitia bersama lintas agama, bakti sosial dan kegiatan kependidikan lainnya.

Dampak Relasi Etnik dan Agama

Dampak dari relasi etnik dan agama di ruang publik pendidikan adalah peserta didik dengan berbagai latar belakang agama dan etnik dapat bekerja bersama membangun perdamaian dan menyuarakan keadilan bagi terciptanya masyarakat yang aman, damai dan harmonis, dengan tetap menghargai keberbedaan masing-masing. Realitas ruang publik pendidikan seperti ini yang diharapkan oleh Paulo Freire dalam rangka membangun kondisi pendidikan yang kritis dan membebaskan.

Freire melihat bahwa, persoalan pendidikan merupakan persoalan krusial karena menyangkut manusia, karena pendidikan dan kemanusiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Freire, pendidikan mesti dikembalikan pada fungsi sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai penindasan dan tekanan, yang memarjinalkan manusia. Karena itu tugas utama lembaga pendidikan adalah mengatur peserta didik menjadi subjek. Untuk mencapai tujuan ini maka

proses yang ditempuh harus mengandaikan dua gerakan ganda: meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus berupaya mentransformasikan struktur sosial yang menjadi penindasan itu berlangsung. Hal penting dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan peserta didik yang beriman, berpengetahuan, berakhlak mulia, berbudi pekerti, berbudaya dan memiliki kepekaan sosial.

Lembaga Pendidikan Sebagai Media Pembentuk Karakter

Awilson dalam Tadkiroatun Musfiroh (2008:27), mendefinisikan karakter sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai-nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Pendidikan karakter merupakan gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan pendidikan membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab dan peduli melalui pemodelan dan mengajarkan karakter baik, dengan penekanan pada nilai universal yang disepakati bersama. Ini adalah suatu usaha yang disengaja dan proaktif baik dari sekolah, daerah, maupun Negara untuk menanamkan kepada peserta didik nilai etika utama, seperti menghargai diri sendiri dan orang lain, bertanggung jawab, integritas, dan disiplin diri.

Pendidikan karakter bukanlah suatu “perbaikan cepat” atau obat kilat untuk anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. Meletakkan tujuan pendidikan karakter dalam rangka tantangan diluar kinerja pendidikan, seperti situasi kemerosotan moral dalam masyarakat yang melahirkan adanya kultur kematian sebagai penanda abad, memang bukan merupakan landasan yang kokoh bagi pendidikan karakter itu sendiri. Sebab dengan demikian, pendidikan karakter memperhambakan demi tujuan kolektif, kuratif situasi masyarakat. Lembaga pendidikan bukanlah lembaga demi reproduksi nilai-nilai social, atau demi kepentingan korektif bagi masyarakat diluar dirinya , melainkan juga mesti memiliki dasar internal yang menjadi ciri bagi lembaga

pendidikan itu sendiri.

Manusia secara natural memang memiliki potensi di dalam dirinya untuk bertumbuh dan berkembang mengatasi keterbatasan dirinya dan keterbatasan budayanya. Di lain pihak manusia juga tidak dapat lalai terhadap lingkungan sekitar dirinya. Tujuan pendidikan karakter mestinya diletakkan dalam kerangka gerak dinamis dialektis, berupa tanggapan individu atas implus natural (fisik dan psikis), sosial, kultural yang melingkupinya, untuk dapat menempa diri menjadi sempurna sehingga potensi-potensi yang ada dalam dirinya berkembang secara penuh yang membuatnya semakin menjadi manusiawi. Semakin menjadi manusiawi berarti ia juga semakin menjadi makhluk yang mampu berelasi secara sehat dengan lingkungan diluar dirinya tanpa kehilangan otonomi dan kebebasannya sehingga dia menjadi manusia yang bertanggung jawab. Untuk itu, ia perlu memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam usaha dirinya untuk menjadi sempurna melalui kehadiran orang lain dalam ruang dan waktu yang menjadi ciri drama singularitas historis tiap individu.

Dengan menempatkan pendidikan karakter dalam kerangka dinamika dan dialektika proses pembentukan individu, para insan pendidik diharapkan semakin dapat menyadari pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk pedoman perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menyediakan ruang bagi figure keteladanan bagi anak didik dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan berupa, kenyamanan, keamanan yang membantu suasana pengembangan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya (teknis, intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis, dan religius).

Membudayakan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dalam konteks Indonesia saat ini sudah sepatutnya dipraktekan dalam sikap hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dimulai

dengan mengajarkan delapan karakter utama dalam pendidikan karakter berikut ini.

- 1) **Courage** : Keberanian / Keteguhan Hati Memiliki keinginan untuk berbuat yang benar meskipun yang lain tidak. Memiliki keberanian untuk mengikuti kesadaran / kebenaran dibandingkan mengikuti kebanyakan orang lain. Memilih hal-hal yang baik bila memang lebih bermanfaat.
- 2) **Good Judgement** : Pertimbangan yang Baik Memilih tujuan hidup yang baik dan membuat prioritas yang sesuai, berfikir sampai pada konsekuensi dari setiap aksi, dan memutuskan berdasar pada kebijaksanaan dan pendirian yang baik.
- 3) **Integrity** : Integritas Memiliki kekuatan dalam (inner strength) untuk jujur, dapat dipercaya, dan berkata benar dalam segala hal. Bersikap adil dan terhormat.
- 4) **Kindness** : Kebaikan hati Perhatian, sopan, membantu, dan memahami orang lain; memperlihatkan perhatian, rasa kasihan, berkawab, dan dermawan, dan memperlakukan orang lain seperti halnya anda ingin diperlakukan.
- 5) **Perseverance** : Ketekunan Tekun mengejar tujuan hidup meskipun dihalangi kesulitan, perlawanan atau keputusasaan. Memperlihatkan kesabaran dan keinginan untuk mencoba lagi meskipun ada keterlambatan, kesalahan atau kegagalan.
- 6) **Respect** : Penghargaan Memperlihatkan penghargaan pada wewenang, pada orang lain, pada diri sendiri, untuk barang hak milik, dan untuk Negara. Dan memahami bahwa semua orang memiliki nilai sebagai manusia.
- 7) **Responsibility** : Tanggung Jawab Bebas dalam menjalankan kewajiban dan tugas, menunjukkan dan dapat diandalkan konsisten dalam perkataan dan perbuatan, dapat dipercaya dalam setiap kegiatan, dan komitmen untuk aktif terlibat dilingkungan
- 8) **Elf-Discipline** : Disiplin Diri Memperlihatkan kerja keras dan komitmen pada tujuan, mengatur diri untuk perbaikan diri dan juga menghindari perilaku gtidak baik, dapat mengendalikan kata-kata, aksi, reaksi, dan juga keinginan. Menghindari seks diluar nikah, narkoba, alcohol, rokok, zat dan perilaku berbahaya lainnya. Melakukan yang terbaik dalam segala hal.

Peran Perguruan Tinggi

Dalam perspektif pendidikan kritis, lembaga pendidikan memiliki andil signifikan dalam membantuk kehidupan politik dan kultural. Prinsip-prinsip pendidikan kritis antara lain: (1) pendidik bukan satu-satunya pusat, karenanya ia bukan satu-satunya pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. (2) peserta didik adalah subjek yang merdeka, (3) isi materi pembelajaran perlu dibuat dengan melibatkan peserta didik, dan (4) kurikulum memperhatikan konteks peserta didik.¹⁸ Memperhatikan konteks Maluku pasca konflik, diperlukan peran aktif lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat agar terbebaskan dari keterpurukan akibat konflik yang dialami maupun kebijakan-kebijakan yang memarjinalkan.

Dalam upaya memaksimalkan peran pendidikan tinggi sebagai ruang publik bagi relasi antar etnik dan agama secara baik, maka beberapa hal yang patut di perhatikan oleh Perguruan Tinggi sebagai berikut: (1) Kaderisasi tenaga dan pimpinan perguruan tinggi. Di dalam mewujudkan misi ini diperlukan rencana kerja yang baik bagaimana tenaga-tenaga dan pimpinan perguruan tinggi direkrut dan dipersiapkan untuk melanjutkan kelangsungan perguruan tinggi yang bermutu. (2) Mengelola sumber-sumber yang ada di dalam suatu lembaga perguruan tinggi. Sumber-sumber tersebut ialah mahasiswa, dana, dan fasilitas. Sumber fasilitas belajar mengajar yang memadai agar supaya *output* yang diperoleh adalah *output* yang mempunyai kualitas. (3) Administrasi. Unsur administrasi sangat menentukan berhasil tidaknya misi dari suatu perguruan tinggi. Tenaga administrasi harus dilaksanakan oleh tenaga-tenaga profesional yang menguasai ilmu dan keterampilan di dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan tinggi. (4) Kelembagaan. Pendidikan tinggi merupakan suatu lembaga pada umumnya tetapi juga suatu lembaga keilmiah yang mengawinkan antara kemampuan manajerial dan kemampuan akademik.

¹⁸M. Agus, Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), h. 6-8.

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan merupakan ruang publik yang efektif bagi terciptanya relasi etnik dan agama karena terdapat tiga unsur utama yang selalu terlibat dalam interaksi atau hubungan timbal-balik di ruang publik pendidikan, yakni pendidik, peserta didik dan orang tua. Masing-masing unsur tersebut memiliki latar belakang sosial berbeda-beda, dan berkontribusi bagi relasi tersebut. Melalui interaksi dan pembauran berbagai unsur di ruang publik pendidikan, setiap orang saling mengenal dan belajar dari keragaman yang dimiliki. Setiap individu diharapkan dapat mentransformasi diri dengan cara menemukan persepsi diri dalam perjumpaan dengan kelompok lain di luar dirinya, sehingga dapat membentuk relasi antar agama dan etnik secara lebih baik. Lembaga pendidikan strategis dijadikan media pembentuk karakter masyarakat (peserta didik) karena hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Lembaga pendidikan dapat membantu masyarakat (peserta didik) menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, berpengetahuan, berakhlak mulia, berbudi pekerti, berbudaya dan memiliki kepekaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. Adnan. (2002). *Maluku Utara; Perjalanan Sejarah 1250-1800*, Jilid I. Cet. I., Ternate, Universitas Khairun.
- Barth, Fredrik. (1998). *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press.
- Coolye, F.L. (1973). dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku*.
- Durkheim. (1965). E. *The Elementary Form of The Religion Life*. New York : The Free Press.
- Harsojo. (1999). *Pengantar Antropologi* Bandung: Puta A. Bardin, Cetakan Kedelapan, April.
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi OFFSET.

- Kana, Niko L. (editor). (2004). *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Koentjaraningrat,dkk. (1984). *Kamus Istilah Antropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Leirisa, R.Z. (1973). *Bungan Rampai Sejarah Maluku* (1). Jakarta; Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional- LIPI.
- Liliweri, Alo. (2005). *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- (2007). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*, cet. II. Yogyakarta: LkiS.
- Lickona, Thomas.(1991). *Educating for Character : How Our school can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Book.
- Marasabessy, Suaidi (ed). (2002). *Maluku Baru; Satu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik*. Jakarta, PT Abadi.
- Nuryatno, M.Agus. (2011). *Mazhab Pendidikan Kritis:Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- O'Donnel. (1991). *Sociology in Focus Race and Ethnicity*. New York Longman, Inc.
- Rijoly, Frans. (1997). *Sejarah Ambon dan Maluku Selatan*. Groningan, tp.
- Ryan, Stephen. (1990). *Ethnic Conflic and International Relations*. USA : Darmouth Publishing Company Limited.
- Musrirroh, Tadkiroatun.(2008). *Pembangunan karakter anak melalui pendidikan karakter dalam tinjauan berbagai aspek character building*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Zuchdi, Darmiyati. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Prespektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cet. 1, UNY Press.